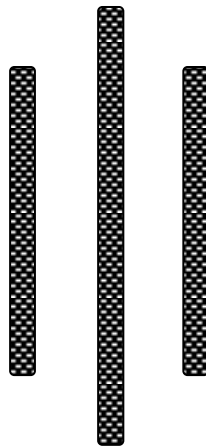




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN JEMBERANA  
TAHUN 2023**



**JALAN MAYOR SUGIANYAR  
NO. 19 NEGARA - BALI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk / media Serta pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana serta bermanfaat bagi seluruh aparat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ( **Good Governance**) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Jembrana

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Para Kepala Bidang di lingkungan BPKAD Kabupaten Jembrana dan seluruh pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2023 ini.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Negara, 24 Januari 2024  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**Drs. I Komang Wiasa, M.Si**  
NIP.196405311986011004



පිටිවික්‍රම කැපයුණු පිළිවෙල  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
කැපයුණු පිටිවික්‍රම කැපයුණු පිළිවෙල  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
කැපයුණු පිටිවික්‍රම කැපයුණු පිළිවෙල  
Jalan Mayor Sugianyar NO. 19 Negara, Kode Pos 82217  
කැපයුණු පිටිවික්‍රම කැපයුණු පිළිවෙල  
Telepon (0365) 4545120 Fax. (0365) 4545122

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 57);, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan  
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten  
Jembrana merupakan Laporan atas capaian Kinerja  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

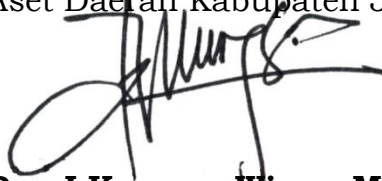
KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud  
dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian  
Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana  
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan  
Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**Drs. I Komang Wiasa, M.Si**

NIP. 196405311986011004

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. A r s i p.

## DAFTAR ISI

halaman

<b>SK PENETAPAN LKjIP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Gambaran Umum .....	4
1.5 Isu-Isu Strategis .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
3.1 Capaian Kinerja BPKAD .....	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
3.3 Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV P E N U T U P .....</b>	<b>39</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan bentuk pertanggungjawaban rencana kerja maupun capaian kinerja selama tahun 2023. Penyusunan laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2023 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah secara periodic, sehingga terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik ( Good Governmance).

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian SKPD yang memuat rencana, capaian dan realisasi indicator kinerja dan sasaran strategis, dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Intansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuags pokok dan fungsi dalam pengelolaan suber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indicator kinerja yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-

2026 sebagaimana tercantum dan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, dimana indicator sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana juga merupakan indicator kinerja utama SKPD yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Kebijakan umum belanja diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan demikian penggunaan anggaran belanja tetap terarah pada prioritas Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

## **1.2. DASAR HUKUM.**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

### **1.3. TUJUAN.**

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun kelima dan rencana Strategis (Renstra) BPKAD periode 2021-2026. Laporan kinerja ini disusun dengan maksud memberikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencaapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai, perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana selama tahun 2023 .
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 .
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran dijawabkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun selanjutnya setda masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

#### **1.4. GAMBARAN UMUM SKPD**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan

sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.

Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang secara teknis dibina oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
2. Pelaksana Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksana Administrasi Badan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Pelaksana Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

1. SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Pasal (7), Ayat(1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai Tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah);
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah.

Sedangkan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana terdiri dari :

- a. **Kepala Badan.**
- b. **Sekretariat** yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian yakni : Subbagian Umum dan Keuangan;
- c. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** terdiri dari Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I ; dan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II.
- d. **Bidang Anggaran Daerah** terdiri dari Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I; dan Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II.
- e. **Bidang Perbendaharaan** Daerah terdiri dari Subbidang Perbendaharaan Daerah I ; dan Subbidang Perbendaharaan Daerah II.
- f. **Bidang PBB-P2 dan BPHTB** terdiri dari Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- g. **Bidang Pajak Daerah Lainnya** terdiri dari Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya
- h. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah** terdiri dari Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan saran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 125 orang, terdiri dari 47 Pegawai ASN dan 78 Orang Pegawai Kontrak, sebagai OPD yang mengelola kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya, tercermin dari prosentase Pegawai ASN PNS dengan jenjang Pendidikan Sarjana (S1 dan S2) sebesar 72.34% (34 orang) dari Pegawai ASN BPKAD Kabupaten Jembrana.

Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat, golongan serta ruang disajikan pada table sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

NO	BIDANG	JML. PEGAWAI (orang)	STRATA PENDIDIKAN					
			S2	S1	D	SMA	SMP	SD
1	Kepala Badan	1	1					
2	Sekretariat	11		4		7		
3	Bidang Anggaran Daerah	6	3	3				
4	Bidang Perbendaharaan Daerah	9		4		5		
5	Bidang Aset	4	1	3				
6.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	1	3				
7.	Bidang PDL	5	1	3		1		
8.	Bidang PBB P2 dan BPHTB	5	1	4				
9.	UPTD. Aset	2		2				
		<b>47</b>	<b>8</b>	<b>26</b>		<b>13</b>		
<b>Pegawai Kontrak</b>		<b>78</b>		<b>25</b>	<b>3</b>	<b>30</b>		
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>						

**Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kabupaten Jembrana Tahun 2023**

Pada dasarnya secara kualitas pegawai BPKAD Kabupaten Jembrana sudah cukup baik. Berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pegawai terdiri dari sarjana sebanyak 26 orang 55.31%, Pasca sarjana 8 Orang 17.02%, dan SMA sebanyak 13 orang 27.65%. Namun dari segi kuantitas masih diperlukan adanya penambahan pegawai dikarenakan beban kerja yang cukup berat.

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat



Struktural Eselon II.b sebanyak 1 Orang, Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 6 orang, Eselon IV.a sebanyak 12 orang, Fungsional sebanyak 6 orang dan Staf PNS sebanyak 19 orang dan Pegawai kontrak 125 Orang.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKAD Kabupaten Jembrana terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana, antara lain

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor ( Gedung )

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana terletak di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 19 Gedung Kantor diatas lahan pemerintah Kabupaten Jembrana seluas 1.500M2, Luas Bangunan I seluas 291 M2 dan Bangunan II seluas 53 M2

b. Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan terdiri dari roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dan Roda 2 sebanyak 12 Unit, untuk kendaraan roda 4 dalam keadaan baik dan berfungsi optimal dan untuk kendaraan roda 2 masih 12 unit dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat pendataan dan penagihan Pajak Daerah serta Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Jembrana

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari computer (PC) sebanyak 71 Unit, Laptop/Notebok sebanyak 72 unit, Printer sebanyak 100 unit

dan server aplikasi sebanyak 12 Unit, sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

### **1.5. ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu-isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, antara lain :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah / aset pemerintah daerah yang didukung dokumen-dokumen yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- e. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 .
- f. Penerapan sisten informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
- g. Terbitnya undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara umum, laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember selama kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran 2023 . Capaian kinerja 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 merupakan jabaran dari Rencana Strategik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Indikator yang ditetapkan atas rencana kerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja BPKAD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

### ***Bab I Pendahuluan***

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan serta gambaran umum OPD BPKAD

### ***Bab II Perencanaan Kinerja.***

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan serta anggaran BPKAD tahun 2023 antara lain Rencana Strategis Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja 2023

### ***Bab III Akuntabilitas Kinerja.***

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 . Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2018 berdasarkan dokumen rentra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026; dan penyajian realisasi anggaran.

### ***Bab IV Penutup.***

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 dan upaya/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang tersusun sistematis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2021-2026 yang berisi tentang tujuan, sasaran, dan strategi yang akan ditempuh dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan. Proses pelaksanaan Rencana strategis juga dilaksanakan melalui Perencanaan Kinerja secara matang, jelas dan sistematis. Perencanaan kinerja sendiri merupakan suatu tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana melalui dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan Perencanaan Kinerja BPKAD Kabupaten Jembrana tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra BPKAD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan

nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi, misi dan akan menjadi komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapaun perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
		Opini BPK	WTP
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai/Predkat LKJIP	80 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok
		Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok
		Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok
		Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%

## **2.2 Rencana Kerja Tahun 2023**

Berdasarkan fungsi yang telah digariskan, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dirumuskan dalam program dan kegiatan, sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

#### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

#### **5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

## **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

### **2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah



- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- h. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- i. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- b. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

#### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Rencana Tahun 2023		
			Target Capaian Kinerja		Anggaran DPA Perubahan 2023
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA</b>				<b>148,666,748,962</b>
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai/Predikat LKJIP PD</b>	<b>80</b>	<b>Nilai</b>	<b>10,962,209,548</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>162,690,000</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	105,060,000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	53,130,000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4,500,000
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,684,933,448</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang	9,627,420,448
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dokumen	51,440,000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	6,073,000
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>35,000,000</b>
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Paket	35,000,000
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>546,336,500</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250	Paket	19,740,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	154,606,500
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	856	Paket	23,728,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410	Laporan	297,662,000
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	50,600,000

<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>42,160,000</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	13,360,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	28,800,000
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>491,089,600</b>
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	37,482,500
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	133,134,500
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	57,000,000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	253,722,600
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	9,750,000
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya (Dokumen)</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>135,041,654,664</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>1,137,776,550</b>
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Dokumen	64,705,800
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100	Dokumen	66,209,800
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,700
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,700
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,994,000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Dokumen	428,133,150
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Dokumen	464,785,800
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	Dokumen	53,949,600
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah</b>	<b>8</b>	<b>dokumen</b>	<b>201,422,350</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40	Dokumen	23,160,450

5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40	Dokumen	19,570,000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	14,500,000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	38,868,800
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	13,125,000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40	Dokumen	21,752,000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	17,300,000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Orang	53,146,100
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>10</b>	<b>dokumen</b>	<b>405,440,050</b>
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	40	Laporan	17,699,300
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	40	Dokumen	12,326,550
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	40	Laporan	54,852,000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40	Laporan	20,764,500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Dokumen	84,146,000
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	16,410,900
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	74,820,000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	77,627,400
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	25,190,950

5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Orang	21,602,450
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>133,297,015,714</b>
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1	Laporan	2,594,595,000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		3	Laporan	130,702,420,714
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>648,394,600</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>648,394,600</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	25,560,000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	12,740,000
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	13,725,000
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	20,390,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	159,676,000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	40	Laporan	9,260,000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40	Laporan	60,025,000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	15,578,550
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40	Dokumen	254,620,050
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40	Laporan	17,750,000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	40	Laporan	59,070,000
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase peningkatan potensi pajak daerah (%)</b>	<b>15</b>	<b>%</b>	<b>2,014,490,150</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2,014,490,150</b>
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	154,231,900
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	259,967,200
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Unit	84,943,500
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	70,900,000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	Layanan	45,501,250

5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	Dokumen	215,328,500
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	1,183,617,800



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana**

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 .

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dan Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d. kurang dari 70	Cukup Baik
4	Kurang dari 55	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat dililustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai/Predikat LKJIP	80 Nilai	84.4 Nilai	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok	10 Dok	100%
		Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok	8 Dok	100%
		Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok	10 Dok	100%
		Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok	11 Dok	100%
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	15%	100%

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari itu dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat berapa pelaksana baik ditingkat Bidang maupun Sub Bidang sebagai pelaksana program dan kegiatan. Sehingga segala pencapaian komponen renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan melalui evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian target kinerja SKPD terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023.

Dari ketiga sasaran strategis diatas sasaran strategis 1 (satu) merupakan penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 2 dan 3 merupakan sasaran strategis utama OPD Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hasil evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

<p align="center"><b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b></p> <p align="center"><b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah</b></p>
---

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok	10 Dok	10 Dok
		Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok	8 Dok	8 Dok
		Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok	10 Dok	10 Dok
		Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok	11 Dok	11 Dok

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran strategis 2 sampai dengan Akhir Periode RENSTRA**

NO	SASARAN STRAGEIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISA SI 2023	TINGKA T KEMAJ UAN
1.	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok	10 Dok	100%
		Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok	8 Dok	100%
		Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok	10 Dok	100%
		Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok	11 Dok	100%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah pada tahun 2023 merupakan sasaran yang berfokus pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah terdapat 4 indikator kinerja yaitu :

1. Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan
2. Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun
3. Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun
4. Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah

**SASARAN STRATEGIS 2 :**  
**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.**

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL 2021	REALISASI	
				2022	2023
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15 % (40.982.006.005,00)	12.12% (45.947.604.333.70)	120.18% (90.232.729.487,70)

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran strategis 3 sampai dengan Akhir Periode RENSTRA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	120.18%	100%

### 3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai /Predikat LKJiP	80 Nilai	84.4 Nilai	100%	10,962,209,548	9,564,166,207	87.25%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok	10 Dok	100%	1,137,776,550	1,019,921,900	89.64%
		Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok	8 Dok	100%	201,422,350	169,983,450	84.39%
		Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok	10 Dok	100%	405,440,050	190,911,950	47.09%
		Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok	11 Dok	100%	648,394,600	386,386,202	59.59%

3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	120.18 %	100%	2,014,490,150	1,584,082,800	78.63%
---	--	---	-----	----------	------	---------------	---------------	--------

Berdasarkan hasil capaian kinerja secara anggaran pada Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah) dengan indikator Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1,137,776,550,00 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 1,019,921,900,00 atau mencapai 89.64%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran 2 dengan indikator Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan termasuk kategori **Baik**

Pada capaian kinerja secara anggaran pada Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah) dengan indikator Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 201,422,350,00 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 169,983,450,00 atau mencapai 84.39%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran 2 dengan indikator Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun termasuk kategori **Baik**.

Pada capaian kinerja secara anggran pada Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah) dengan indikator Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 405,440,050,00 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 190,911,950,00 atau mencapai 47.09%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran 2 dengan Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun termasuk kategori **Baik**.



Pada capaian kinerja secara anggaran pada Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah) dengan indikator Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 648,394,600,00 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 386,386,202,00 atau mencapai 59.59%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran 2 dengan indikator Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah termasuk kategori **Baik**.

Berdasarkan hasil capaian kinerja secara anggaran pada Sasaran 3 (Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah) dengan indikator Persentase peningkatan potensi pajak daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2,014,490,150,00 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp.1,584,082,800,00 atau mencapai 78.63%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran 3 dengan indikator Persentase peningkatan potensi pajak daerah termasuk kategori **Sangat Baik**.

## REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Rencana Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		
			Target Capaian Kinerja		Anggaran DPA Perubahan 2022	Realisasi Target Capaian Kinerja		Realisasi DPA Perubahan 2022
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA				148,666,748,962			143,016,873,223
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai/Predikat LKjIP PD	80	Nilai	10,962,209,548	80	Nilai	9,564,166,207
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	162,690,000	100	%	147,743,700
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	105,060,000	7	Dokumen	103,470,000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	53,130,000	6	Laporan	40,290,000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4,500,000	5	Laporan	3,983,700
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	9,684,933,448	100	%	8,684,690,499
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang	9,627,420,448	49	Orang	8,645,495,499
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dokumen	51,440,000	3	Dokumen	38,560,000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	6,073,000	5	Laporan	635,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	35,000,000	100	%	35,000,000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Paket	35,000,000	100	Paket	35,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	546,336,500	100	%	362,894,716
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250	Paket	19,740,000	250	Paket	19,342,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	154,606,500	47	Paket	117,616,500

5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	856	Paket	23,728,000	856	Paket	20,522,100
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410	Laporan	297,662,000	410	Laporan	161,026,116
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	50,600,000	2	Dokumen	44,388,000
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>42,160,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>18,086,307</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	10,022,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	28,800,000	12	Laporan	8,064,307
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>491,089,600</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>315,750,985</b>
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	37,482,500	1	Unit	36,173,074
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	133,134,500	14	Unit	121,862,411
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	57,000,000	65	Unit	35,013,000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	253,722,600	3	Unit	114,702,500
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	9,750,000	20	Unit	8,000,000
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya (Dokumen)</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>135,041,654,664</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>131,482,238,014</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>1,137,776,550</b>	<b>28</b>	<b>dokumen</b>	<b>1,019,921,900</b>
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Dokumen	64,705,800	100	Dokumen	62,020,700
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100	Dokumen	66,209,800	100	Dokumen	52,079,700
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,700	40	Dokumen	11,567,700
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,700	40	Dokumen	7,666,000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,999,000	40	Dokumen	12,411,300

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40	Dokumen	14,994,000	40	Dokumen	11,042,800
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Dokumen	428,133,150	100	Dokumen	389,434,250
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Dokumen	464,785,800	100	Dokumen	430,356,250
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	Dokumen	53,949,600	10	Dokumen	43,343,200
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah</b>	<b>8</b>	<b>dokumen</b>	<b>201,422,350</b>	<b>8</b>	<b>dokumen</b>	<b>169,983,450</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40	Dokumen	23,160,450	40	Dokumen	23,160,450
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,570,000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	14,500,000	1	Dokumen	14,000,000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	38,868,800	12	Dokumen	17,272,800
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	13,125,000	12	Laporan	12,585,000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40	Dokumen	21,752,000	40	Dokumen	21,752,000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	17,300,000	1	Dokumen	15,254,000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Orang	53,146,100	40	Orang	46,389,200
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>10</b>	<b>dokumen</b>	<b>405,440,050</b>	<b>10</b>	<b>dokumen</b>	<b>190,911,950</b>

5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	40	Laporan	17,699,300	40	Laporan	2,677,500
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	40	Dokumen	12,326,550	40	Dokumen	832,000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	40	Laporan	54,852,000	40	Laporan	26,131,450
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40	Laporan	20,764,500	40	Laporan	7,259,500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Dokumen	84,146,000	1	Dokumen	74,880,000
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	16,410,900	1	Dokumen	1,000,000
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	74,820,000	1	Dokumen	72,000,000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	77,627,400	1	Dokumen	-
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	25,190,950	1	Dokumen	-
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Orang	21,602,450	40	Orang	6,131,500
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>133,297,015,714</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>130,101,420,714</b>
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1	Laporan	2,594,595,000	1	Laporan	-
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		3	Laporan	130,702,420,714	3	Laporan	130,101,420,714
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>648,394,600</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>386,386,202</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>648,394,600</b>	<b>11</b>	<b>Dokumen</b>	<b>386,386,202</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	25,560,000	1	Dokumen	20,394,000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	12,740,000	1	Dokumen	4,210,000

5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	13,725,000	1	Dokumen	6,070,000
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	20,390,000	1	Dokumen	10,184,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	159,676,000	40	Laporan	97,935,914
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	40	Laporan	9,260,000	40	Laporan	4,285,000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40	Laporan	60,025,000	40	Laporan	50,364,267
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	15,578,550	40	Laporan	8,813,200
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40	Dokumen	254,620,050	40	Dokumen	164,921,821
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40	Laporan	17,750,000	40	Laporan	1,868,000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	40	Laporan	59,070,000	40	Laporan	17,340,000
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase peningkatan potensi pajak daerah (%)</b>	<b>15</b>	<b>%</b>	<b>2,014,490,150</b>	<b>15</b>	<b>%</b>	<b>1,584,082,800</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2,014,490,150</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,584,082,800</b>
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	154,231,900	2	Dokumen	61,980,650
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	259,967,200	2	Laporan	242,306,400
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Unit	84,943,500	2	Unit	39,796,300
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	70,900,000	2	Laporan	37,000,000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	Layanan	45,501,250	2	Layanan	44,969,050
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	Dokumen	215,328,500	2	Dokumen	108,170,976
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	1,183,617,800	2	Dokumen	1,049,859,424

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Pemerintah yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Perjanjian Kinerja selama tahun 2023. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 96.20% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 148,666,748,962.00 Dari anggaran yang tersedia tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 143,016,873,223,00 atau 96.20%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkret melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.

Dari hasil analisis kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian indikator kinerja secara umum, dapat mencapai sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Pagu Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sehingga terjadi penghematan pada beberapa kegiatan.

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain;

1. Masih terdapatnya piutang pada Pajak Daerah dan terjadinya penurunan realisasi Pajak Daerah.
2. Data mengenai peta blok masih ada yang perlu dirapikan sesuai kondisi untuk obyek pajak.
3. Masih terdapatnya SPPT tercetak yang tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan banyaknya pemilik yang tidak berdonisili sama dengan lokasi obyek pajak.
4. Melakukan penajaman prioritas, berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki/mendukung.

Strategi pemecahan atau langkah-langka antisipatif untuk perbaikan kedepannya adalah;

1. Dilakukan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat Kabupaten Jembrana.



2. Dilakukan kegiatan pendataan kembali Wajib Pajak Daerah.
3. Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap petugas penagihan.
4. Dilakukan penambahan pegawai yang handal serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar kegiatan pembongkaran BMD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

Negara, 24 Januari 2024  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**Drs. I Komang Wiasa, M.Si**  
NIP. 19640531 198601 1 004

# LAMPIRAN LKjIP

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**LAPORAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN A PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai/Predikat LKJIP PD</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7		
b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6		
c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5		

<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	49	49		
b)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	3		
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	250	250		
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	47	47		
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	856	856		

d)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	410	410		
e)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	500		
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1		
b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14		
c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	65	65		

d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		
e)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya (Dokumen)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		
<b>1</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		
a)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	100	100		
b)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	100	100		
c)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikas	Dokumen	40	40		
d)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	40		
e)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	umlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	40		

f)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	40		
g)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	100	100		
h)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	100	100		
i)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	10		
<b>2</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a)	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	40	40		
b)	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	40	40		
c)	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	1		

d)	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12		
e)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	40	40		
f)	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	40	40		



g)	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1		
h)	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40	40		
<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	Dokumen	<b>10</b>	<b>10</b>		
a)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	40	40		
b)	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	40	40		
c)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	40	40		

d)	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	40	40		
e)	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokemen	1	1		
f)	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokemen	1	1		
g)	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokemen	1	1		
h)	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokemen	1	1		
i)	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokemen	1	1		

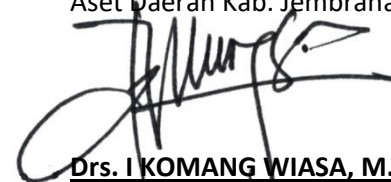
J)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40	40		
<b>4</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Laporan	<b>3</b>	<b>3</b>		
a)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1		
b)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)</b>	<b>Dokeumen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>Dokeumen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		
a)	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokeumen	1	1		
b)	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokeumen	1	1		
c)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokeumen	1	1		
d)	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokeumen	1	1		

e)	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	40	40		
f)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	40	40		
g)	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	40	40		
h)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	40	40		
i)	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	40	40		
J)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	40	40		
k	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	40	40		
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
a)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	2		

b)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2		
c)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	2		
d)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	2		
e)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2	2		
f)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	2		
g)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	2	2		

Negara, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Jember



**Drs. I KOMANG WIASA, M.Si**

Nip. 196405311986011004